

MANIPULASI KEMISKINAN (Budaya Korupsi Di Kalangan Masyarakat Muslim)

Indal Abror

Abstrak

Munculnya fenomena yang sangat kuat masyarakat bawah di sebuah kabupaten, yang mayoritas muslim, yang telah berani memanipulasi data kemiskinan demi untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan demikian masyarakat tersebut telah membudayakan *kufur* dan bukan *Syukr* atas nikmat yang telah diterimanya. Dan Fenomena tersebut terjadi tidak hanya ketika ada Program Raskin tetapi juga pada Bantuan Dana Kompensasi BBM. Subyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Muslim penerima Raskin di KabupatenM, yang meliputi warga muslim penenerima Raskin di beberapa kecamatan di kabupatenM, yang selama ini diindikasikan banyak penyimpangan baik yang dekat dengan kantung-kantung pesantren maupun yang jauh atau tidak ada pesantrennya. Dengan melalui pendekatan yang bersifat deskriptif analitik,serta yang lebih menekankan secara kualitatif, penulis berusaha untuk mengungkap praktek manipulasi data dalam program Raskin, dan ternyata Program Raskin khususnya juga BLT di kabupatenM banyak tidak tepat sasaran.

A. Pendahuluan

Di Indonesia kinerja dan prestasi korupsi, sungguh fantastis. Karena menurut laporan dari lembaga Tranparancy International Indonesia (TII), tingkat korupsi di Indonesia bahkan lebih tinggi dari Ethiopia, Senegal, Malawi, Zmabia, yaitu Negara-negara yang paling miskin di dunia. Semua itu

menunjukkan bahwa, sungguh suatu prestasi penyelenggaraan negara yang luar biasa memalukan dan begitu bejat. Hasil penelitian Pusat Studi dan Pengembangan Kawasan (PKPS) tahun 2001 semakin meyakinkan kita semua, yakni dengan di temukannya fakta bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya bangsa, yang terungkap dalam praktek, kebiasaan dan peribahasa¹.

Adalah kenyataan yang sulit di bantah memang bahwa korupsi telah menyebar dan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa (dalam berbagai bentuknya), di semua level dan lini, mulai dari desa sampai pimpinan negara, sehingga korupsi telah bersifat sistemik. Pola hubungan social tampaknya selalu terkontaminasi oleh kebiasaan korupsi, apalagi nyata-nyata media yang digunakan dalam melakukan dan atau membangun hubungan itu berkaitan langsung dengan urusan uang, maka korupsi akan sulit dihindari. Kita bisa buktikan semua itu dengan memantau secara langsung semua elemen masyarakat bangsa ini, mulai masyarakat yang mengelola birokrasi pemerintah, lembaga legislatif, pengusaha, dan kelompok-kelompok masyarakat juga sudah semakin tak segan-segan dalam melakukan korupsi. Makanya, kemudian wilayah-wilayah korupsi tumbuh subur di semua lini dan level kehidupan masyarakat: di lingkungan birokrasi pemerintah, termasuk di kalangan penegak hukum, di kalangan pengusaha, dan bahkan sampai pada kalangan masyarakat akar rumput/masyarakat bawah.²

Bentuk korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat muslim dikabupaten M dapat terlihat dalam Program Raskin di KabupatenM, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Drs. Susanto, kbid Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB KabupatenM pada acara Dialog Publik, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005 yang lalu yang mengambil tema tentang Program

¹ Laode Ida, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, (Jakarta: P3M,2004), hlm. 58

² *Ibid.*, hlm. 61

Raskin (Beras Miskin), yang mana, dalam proses penyalurannya telah terjadi berbagai penyimpangan (KKN), baik yang dilakukan oleh para aparat di tingkat kabupaten, terlebih di tataran aparat desa, dan yang lebih memprihatinkan masyarakat bawah pun ikut-ikutan melakukan penyimpangan.

Adapun praktek penyimpangan yang dilakukan oleh Masyarakat bawah tersebut adalah dapat dilihat dari data BPS dan Satgas Raskin Kab.M. Dimana jumlah KK Miskin mengalami kenaikan yang sangat dratis, ketika ada program subsidi dari Pemerintah. Dan begitu juga sebaliknya jumlah KK Miskin menjadi mengecil ketika di Kab.M ada pendataan KK Miskin untuk program transmigrasi.

Dengan demikian munculnya fenomena yang sangat kuat masyarakat bawah di KabupatenM, yang mayoritas muslim, bahkan sebagian besar ada di dekat kantung-kantung pesantren, telah berani memanipulasi data kemiskinan demi untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan demikian masyarakat tersebut telah membudayakan *kuftr* dan bukan *Sukr* atas nikmat yang telah diterimanya. Dan Fenomena tersebut terjadi tidak hanya ketika ada Program Raskin tetapi juga pada Bantuan Dana Kompensasi BBM. Dengan demikian Program Raskin khususnya juga BLT banyak tidak tepat sasaran. Akhirnya Program Raskin dan BLT cukup banyak dinikmati oleh KK.PNS, ABRI/TNI, Keluarga mampu bahkan pengusaha. (Disampaikan oleh Drs Susanto, Kabid Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB KabupatenM pada acara Dialog Publik, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005, yang mengambil tema tentang Program Raskin (Beras Miskin))

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik. Yang memprihatinkan, justru ketika adanya anggapan membudayakan korupsi ini makin menguat, sebenarnya posisi keyakinan keberagamaan di negeri ini menjadi ironic dan dipertanyakan relevansinya. Tak adakah hubungan kesalehan dalam keberagamaan dengan pengurangan

bahkan pencegahan tindak korupsi? Atau sebetulnya memang ada yang salah dalam corak keberagaman masyarakat kita, sehingga bisa dikatakan solat yes, korupsi jalan terus! Pertanyaan-pertanyaan sejenis itu masih bisa muncul tetapi jelas ironis tersebut menunjukkan betapa selama ini kaum beragama di negeri ini gagal menumbuhkan kepekaan moral dalam peta kesadaran umatnya menghadapi kejahatan korupsi.

Oleh karena itu pilihan beberapa sample wilayah penelitian, diambil wilayah yang ada pesantrennya dan wilayah yang jauh/tidak ada pesantrennya. Dipilihnya wilayah pesantren sebabkan karena pesantren sebagai markas perubahan setidaknya memiliki dua aspek strategi, *Pertama*, sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berada di luar jangkauan negara, lembaga ini bukan saja memiliki kemandirian dan kenetralan politik, tetapi juga sensitifitas dalam mewakili kelompok Dhu' afa dan kaum tertindas. *Kedua*, Krusialnya figure kyai sebagai symbol moralitas yang memiliki kewibawaan dalam menegakkan etika public, termasuk keterlibatannya sebagai agen kebudayaan dalam membangun kesadaran social.

Sedangkan dipilihnya wilayah yang tidak ada pesantrennya/jauh dari pesantren, diharapkan bisa menjadi bahan bandingan dari wilayah yang dekat/ada pesantrennya. Setidaknya wilayah yang demikian kehidupan dan pemahaman keagamaannya akan berbeda dengan masyarakat/wilayah pesantren.

Secara umum korupsi memiliki beberapa definisi. Dalam pengertian yang sempit korupsi berarti "Penyalahgunaan kekuasaan public bagi kepentingan pribadi (*Misuse of public for private gain*) Ada juga yang mengartikan secara lebih luas, yakni sebagai penyalahgunaan urusan public, pelanggaran kepentingan public, pencelaan opini public, dan penggunaan urusan public secara illegal bagi kepentingan pribadi.

Dengan kata lain, korupsi dapat dimengerti sebagai tindakan mengambil tau menggunakan uang atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kerlompok dan golongannya. Ter-

masuk dalam hal ini adalah : Perebutan kebijakan yang koruptif (BLBI, Penjualan asset negara/Privatisasi), suap menyuap, mark-up proyek, tender pinjam bendera, berdagang hokum, menurunkan kualitas proyek, proyek fiktif, politik uang, menaikkan harga kwitansi, manipulasi data, menjual lowongan pekerjaan, membuat laporan ganda, merekayasa laporan bersama BPKP, mengubah nilai agunan pinjaman di bank, pem,anfaatan pinjaman bank untuk usaha di luar proposal.

Dalam berbagai dokumen keagamaan Islam, terutama di lingkungan kaum sufi, selalu disebut 3 hal, sebagai sumber kejahatan dalam kehidupan manusia. *Yang pertama* adalah kemiskinan, disusul oleh ketidaktahuan dan terakhir adalah kerakusan. *Pertama*, Alasan kemiskinan sebagai pendorong atau penggoda untuyk menerima suap atau melakukan praktek korupsi lain, telah digarisbawahi dalam sebuah hadits Nabi. Kemiskinan tidak hanya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam tindak kejahatan, namun dapat juga menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran, yakni pengingkaran total terhadap Tuhan dan nilai-nilai kebenaran dan keluhuran lainnya. *Kaada al-Faqr an yaksama kufra*, hampir-hampir kefakiran itu menjelma menjadi kekufuran itu sendiri. Memang tidak terlalu sulit untuk menjelaskan kenapa rakyat yang rata-rata serba kekurangan, tanpa piker panjang bersedia mempertukarkan keimanannya demi untuk mendapatkan sebuah materi.

Sungguh rapuh gagasan terwujudnya kehidupan masyarakat yang taat beragama, bermoral dan berbudi luhur tanpa ditopang tingkat kesejahteraan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warganya. Al Qur'an menegaskan bahwa kesejatian beragama seseorang tidak diukur dengan tingkat kesetiaannya dating ke masjid, melainkan dengan kesungguhan dalam upaya memecahkan persoalan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

Alasan tidak tahu, bahwa manipulasi, suap, dan bentuk korupsi lainnya melanggar norma moral dan akidah agama

berkaitan dengan pola budaya suatu masyarakat. Ada indikasi kuat bahwa bagi kebanyakan masyarakat kita, baik yang miskin maupun yang berkecukupan, masih merasa samar tentang status imoralitas (jahatnya) korupsi terutama bentuk manipulasi data. Dalam kamus etika dan moral mayoritas orang Indonesia, yaitu mereka yang dianggap "Orang Jawa", yang secara eksplisit-definitif dicela sebagai tindakan kejahatan yang wajib dimusuhi masyarakat, yakni hanya 5(Lima) perkara. Yang terkenal dengan sebutan "Mo Limo" dalam masyarakat Jawa terdiri atas Main (Judi), Maling (Mencuri), Madon (berzina), Madat (Mabuk alcohol, Narkoba) dan Mateni (Membunuh).

Definisi kejahatan adalah segala sesuatu yang mencekakan diri sendiri/oranglain. Adapun masih sulitnya mereka, yakni masyarakat muslim memahami bahwa manipulasi data adalah merupakan bentuk korupsi yang merugikan orang lain, merupakan salah satu faktor penyebab maraknya budaya manipulasi data.

Sehingga pola ini juga ditemukan di kalangan masyarakat muslim di M yang melakukan praktek manipulasi data. Bahkan bagi mereka manipulasi data dianggap sah-sah saja. Apalagi bila diingat bahwa dalam wacana fiqh, sebagai teori hukum syariat Islam, istilah atau konsep korupsi terutama bentuk manipulasi data ini belum dikenal. Adapun yang relatif banyak dikenal adalah kufur/tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

B. Profil Kabupaten M

Kabupaten M merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, lokasinya berada diantara beberapa kabupaten dan kota antara lain : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota M, serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi geografi kabupaten ini adalah : 110 01'51" bujur timur -

110 25'58" bujur timur dan 7 19'13" lintang selatan - 7 42'16" lintang selatan Wilayah kabupaten M dibatasi oleh wilayah-wilayah lain sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Semarang
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Propensi DI Yogyakarta
- Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Boyolali

C. Pelaksanaan Syariat Islam Keluarga Miskin Kabupaten M

Syariat sebagaimana definisi di atas merupakan praktek keagamaan yang dijalankan setiap Muslim, yang berupa aturan pokok ibadah yang dirumuskan dalam rukun Islam. Sebagaimana Muslim pada umumnya, Keluarga Miskin di Kabupaten M juga mengenal aturan yang telah digariskan tersebut yang diterangkan dalam istilah rukun Islam.

Syahadat, Keseluruhan dari Keluarga miskin, sebagaimana telah penulis teliti mayoritas adalah beragama Islam. mereka mengetahui bahwa sebagai Muslim mereka tidak terhindar dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama, walaupun dalam pelaksanaannya semua kembali kepada pemahaman dan keluasaan ilmu agama, serta kepercayaan yang mereka miliki. Begitu juga mereka percaya dan sadar bahwa seseorang untuk menjadi Muslim harus bias mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai bukti bahwa seseorang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad adalah sebagai utusannya.

Sholat, Sholat menurut bahasa adalah do'a. Adapun yang dimaksud sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan Takbirotul Ikhrom dan diakhiri dengan salam. Sholat sebagai rukun Islam yang kedua wajib dilaksanakan oleh umat Islam, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam.

Berdasarkan pengamatan penulis belum semua Keluarga miskin menjalankan sholat secara berjamaah di masjid. Ada be-

berapa keluarga miskin yang mengerjakan sholat secara sendiri-sendiri dan ada juga yang belum sadar ingin melaksanakan sholat. Menurut keterangan yang diperoleh di lapangan, baru ada 25% dari Keluarga miskin yang sudah menjalankan sholat wajib lima waktu, juga menjalankan sholat-sholat sunah yang lain.

Puasa, Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, zina dan sebagainya yang dituntut oleh syara' dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, karena mengharap pahala dari Allah SWT. Pengamalan puasa bertujuan agar menjadi orang yang bertaqwa yaitu benar-benar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan segala perintah-Nya. Dengan puasa dapat melatih seseorang untuk menahan segala nafsu yang ada dalam tubuh manusia, disamping juga sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meningkatkan kualitas keimanan.

Pada bulan Romadhon para keluarga miskin juga melakukan puasa sebagaimana orang Muslim yang lainnya dan pelaksanaannya berjalan seperti biasa. Ketika waktu berbuka puasa telah tiba mereka mengikuti buka bersama yang biasa diadakan di masjid yang dilakukan selama bulan puasa. Acara berbuka puasa ini biasa disebut ta'jilan.

Selain puasa Romadhon yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, ada sebagian Keluarga miskin yang juga melakukan puasa-puasa sunah yang lain seperti puasa Senin dan Kamis. Sedangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu mereka melakukan puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang kejawen yang biasa disebut laku (*ikhtiar*).

Zakat, Bagi para Keluarga miskin, zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Dilihat dari kehidupan sosial ekonomi mereka, kemungkinan untuk melaksanakan zakat bagi mereka sangat

kecil. Kebanyakan dari mereka masih mendapatkan zakat dari para keluarga mampu lainnya.

Haji, Haji merupakan rukun Islam yang terakhir, yang dicita-citakan oleh hampir setiap Muslim, tidak terkecuali para keluarga miskin. Di lihat dari kehidupan social ekonomi mereka, kemungkinan untuk melaksanakan haji sangatlah kecil. Namun demikian ada pula Keluarga miskin yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji dengan biaya sendiri. Dengan demikian para para keluarga miskin juga mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana orang islam umumnya.

D. Pengetahuan dan Pemahaman Keluarga miskin penerima Raskin terhadap Syariat Islam

Pengetahuan agama merupakan faktor terpenting bagi seseorang sebagai dasar untuk menjalankan perintah agama, mengetahui yang harus dikerjakan dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Pengetahuan tersebut dapat dimulai dari ketertarikan seseorang untuk mempelajarinya, baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Mayoritas Keluarga miskin memperoleh pendidikan agama Islam selain dari orang tua, juga mendapatkan dari lingkungan masyarakat sekitar yang berupa pengajian rutin yang biasa diselenggarakan di masjid-masjid atau langgar.

Materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut bermacam-macam, seperti masalah ibadah dan muamalah. Para Keluarga miskin sadar bahwa dengan mengikuti pengajian tersebut mereka bias menambah pemahaman tentang syariat, tentang tata cara beribadah, akidah yaitu kepercayaan terhadap Allah. Syariat, tentang tata cara beribadah kepada Allah dan bagaimana harus bersikap terhadap sesama manusia sesuai dengan ajaran Islam (akhlak).

Dari hasil wawancara di lapangan belum semua Keluarga miskin penerima Raskin dapat membaca al-Quran. Dari kese-

luruhan Keluarga miskin yang penulis teliti hanya ada 75 % yang dapat membaca al-Quran, yang secara kebetulan kebanyakan mereka berada di wilayah pusat-pusat keagamaan, di wilayah tersebut ditemukan beberapa pesantren. Mereka bisa membaca al-Quran karena dibimbing oleh orang tua mereka dan ada pula yang mendapat al-Quran kareja belajar dari guru ngaji mereka atau di pesantren di desanya. Sedangkan mereka yang tidak/belum bias baca al Qur'an, berasal dari wilayah kecamatan Borobudur, yang secara kebetulan sangat jarang ditemukan pusat-pusat pendidikan keagamaan taupun pesantren.

Menurut mereka yang bias membaca, membaca al-Quran merupakan suatu sarana untuk mendapatkan diri kepada Allah, selain itu mereka juga mendapatkan pahala dari membaca Al Qur'an sebanyak huruf yang mereka baca tersebut. Namun pemahaman yang demikian itulah yang mendorong mereka untuk membaca al Qur'an sebanyak-banyaknya tanpa mengetahui isi dan kandungan dari ayat-ayat yang mereka baca tersebut. Sehingga mereka membaca al-Qur'an tetapi tidak mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.

E. Pandangan Keluarga Miskin terhadap Syari'at Islam terutama pemahaman mereka terhadap Konsep Syukur

Berawal dari pengejawatahan mereka terhadap syari'at Islam, mereka dapat mewujudkan dalam tingkah laku ritual, kepercayaan mereka dalam kehidupan sebagai insane beragama. Mulanya Kelaurgha Miskin mengikuti ajaran Islam bukan sepenuhnya atas kesadaran pribadi tetapi mereka beragama Islam karena Islam telah dipeluk oleh orang tua serta nenek moyang mereka, sehingga bias disebut Islam keturunan. Adapun dari nenek moyang mereka, ajaran Islam tidak sepenuhnya mereka kuasai. Mereka hanya sebatas memeluk Islam, tetapi belum bias meninggalkan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat-

nya, yaitu budaya yang mendapat pengaruh kuat dari tradisi Jawa dan Hindu Budha atau biasa disebut Islam Jawa.

Adapun pandangan mereka terhadap syukur atas nikmat yang telah diberikan Alloh SWT, Oleh karena berawal dari minimnya pengetahuan mereka tentang ajaran Islam serta minimnya kemauan untuk mempelajari Islam secara menyeluruh atau Kaffah., maka kebanyakan dari mereka yaitu para Keluarga miskin penerima Raskin belum bias memahami makna syukur dengan baik.

Dari hasil wawancara di lapangan belum semua Keluarga miskin penerima Raskin dapat bersikap qonaah dan bersyukur atas nikmat yang diperolehnya. Dari keseluruhan Keluarga miskin yang penulis teliti hanya ada 25 % yang dapat memahami dan mempraktikan sikap syukur dalam kehidupannya. yang secara kebetulan kebanyakan mereka berada di wilayah pusat-pusat keagamaan, di wilayah tersebut ditemukan beberapa pesantren. Mereka bisa bersikap qonaah, nerimo ing pandum dan tidak tamak, justru mereka tetap senang tiasa bersyukur, walaupun kehidupan ekonominya pas-pasan. Hal ini tidak bias dilepaskan dari belajar dari guru ngaji mereka atau di pesantren di desanya. Sedangkan mereka yang tidak/belum bisa bersikap qonaah, nrimo ing pandum, tidak mau bersyukur bahkan senantiasa merasa kurang, berasal dari wilayah kecamatan Borobudur, yang secara kebetulan sangat jarang ditemukan pusat-pusat pendidikan keagamaan ataupun pesantren.

Menurut mereka yang bisa bersikap qonaah, nrimo ing pandum, tidak tamah, bahkan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diterimanya, memahami nikmat Alloh sudah sangat luas, bagi mereka nikmat Allah itu tidak hanya yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat materi yakni umur yang panjang kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam urusan dunia, mereka senantiasa melihat orang-orang yang dibawahnya. Sehingga mereka senantiasa kan bersyukur atas nikmat yang diterimanya.

F. Program Raskin di Kabupaten M

Program Raskin merupakan Program pemerintah dalam rangka memberikan bantuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga bagi keluarga miskin, berupa penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok keluarga miskin berupa beras.

Program Raskin sudah dimulai sejak 1998, sehingga telah berlangsung selama 8 tahun. Adapun dalam pelaksanaannya banyak terjadi masalah, yaitu pada awal tahun pertama, yaitu dengan dibagi tidak rata, tiap desa menetapkan harus dibagi minimal 10-20 kg/KK. Hal tersebut juga berdasar pada keputusan Gubernur melalui sosialisasi ke seluruh kepala desa di propinsi Jawa Tengah. Akan tetapi di beberapa desa rumah kepala desa menjadi sasaran masyarakat yang tidak puas. (Drs. Susanto, kabid Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten M pada acara Dialog Publik, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005 yang lalu yang mengambil tema tentang Program Raskin (Beras Miskin)

Realisasi dalam proses pendistribusian Raskin, dari tahun ke tahun selalu terjadi penyimpangan. Penyimpangan terhadap pemenuhan beras miskin (Raskin) di Kabupaten M masih saja terjadi, tidak hanya di M bahkan di Jawa Tengah ada sekitar 6 kabupaten/kota yang bermasalah. Meski persoalan ini sering diungkap, penyimpangan masih tetap terjadi. Selain tidak tepat sasaran, juga sedikitnya terdapat enam wilayah di M, kedapatan membagikan beras raskin dengan kualitas yang tidak sesuai standar pemerintah.

Dalam masalah pembagian raskin, pemerintah sudah memberikan subsidi sebesar Rp.2.200 per kilogram. Dengan Subsidi ini, maka masyarakat miskin dapat menebus beras subsidi tersebut dengan harga Rp.1000 per kilogram. Dengan harga tersebut, seharusnya instansi yang mendistribusikan raskin tersebut dapat memberikan beras sesuai standar harga Rp.3200

atau sama dengan Inpres no.13 tahun 2005. Bukan beras rusak yang sebenarnya sudah tidak layak dikonsumsi. Akan tetapi realisasi yang terjadi di lapangan tidak demikian. Masyarakat miskin tetap saja mendapatkan beras dengan kualitas yang jauh dari harapan, selain itu banyak dalam proses pendistribusian banyak terjadi tidak tepat sasaran.

Raskin pada hakekatnya seharusnya dialokasikan bagi masyarakat miskin dengan distribusi 20 kilogram perkepala keluarga (KK). Namun realisasi yang terjadi di lapangan, raskin ini dibuat bancakan atau didistribusikan atau dibagikan secara merata kepada semua warga. Hal tersebut sudah merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan yang sudah di atur, terlebih kebanyakan dari mereka banyak ditemukan dari keluarga-keluarga mampu. Oleh karena itu dalam pelaksanaan distribusinya, PemKab.Magelang membentuk Satgas Raskin, yang beretugas memonitor distribusi Raskin. Satgas ini selain melakukan sidak ke gudang-gudang Bulog, juga melakukan sidak ke tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan penyimpangan di lapangan, penyimpangan terjadi dikarenakan para pengelola raskin di tingkat desa kurang teliti dalam menerima raskin, sehingga banyak raskin yang didistribusikan kepada warga masyarakat yang tidak berhak menerima.

Agar supaya raskin dapat disalurkan tepat kepada warga yang berhak menerimanya, dengan mutu yang bagus, sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya misalnya; dengan memeriksa dahulu salah satu karung untuk mengetahui kualitasnya, dan mencermati label nama mitra bulog pada setiap karung, selain itu perlu adanya kroscek ulang atas data penerima bantuan raskin. Dengan demikian, setiap ada penyelewengan bias cepat dikenali sumbernya untuk diusut. Dalam proses mengontrol dan mengawasi pendistribusian raskin, juga telah dilakuakn upaya adanya partisipasi masyarakat. Baik dalam memeriksa, mengawal hingga dalam proses membuat laporan sebagai bahan pengaduan temuan masyarakat. Hal ini dilakuakn agar penyaluran

raskin tepat sasaran, yaitu diutamakan untuk warga miskin. Salah-satunya dengan menggunakan indicator penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan demikian, apabila penyaluran ini tepat sasaran, dan bias memperkecil peluang penyalahgunaan, maka tujuan program raskin akan dapat tercapai sesuai yang ditargetkan. Akan tetapi cukup banyak wilayah di kabupaten yang masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari data realisasi Raskin berikut:

- Sasaran +Keluarga Miskin (72.227 KK). kuantum/jatah dari Pusat = 53.792 KK atau 1.075.840 kg/bulan.
- Mestinya tiap KK miskin mendapat jatah raskin 14,895 kg/bulan
- Realitasnya Per KK mendapat rata-rata 4 kg/bulan atau yang mendapat 268.960 KK, atau 88,32 % atau 1.075.840 kg/bulan. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat desa menghendaki: Rembug desa/ musyawarah desa, yang dihadiri para parat desa, lembaga desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta wakil warga.

Didalam rembug desa tersebut memutuskan menetapkan siapa saja yang berhak menerima raskin, tidak menadnag itu keluarga mampu atau tidak mampu, sejahtera atau tidak sejahtera, asal mau membeli Rp.1000, perkilogramnya, maka warga itupun bias mendapatkan. Begitu juga sebaliknya meskipun warga tersebut termasuk keluarga orang tidak mampu, tetapi Karen atidak mampumembeli Raskin Rp.1000,- perkilogramnya, maka haknya akan hilang. Dengan demikian masyarkat ramaai-ramai melakuakn manipulasi data guna mendapatkan bantuan raskin. Sebagaimana dikatakan oleh Sumidi, panitia penyalur reaskin di kecamatan mungkid. Lain halnya yang dinyatakan oleh Bpk. Zulkarnain, tokoh dari kecamatan Dukun, Srumbung yang menyatakan bahwa penyaluran raskin di wilayahnya kurang tepat, dimana selain menetapkan siapa saja berhak

menerima raskin, yakni tidak memandang itu keluarga mampu atau tidak mampu, sejahtera atau tidak sejahtera, asal mau membeli Rp.1000, perkilogramnya, maka warga itupun bias mendapatkan. Begitu juga sebaliknya meskipun warga tersebut termasuk keluarga orang tidak mampu, tetapi Karen atidak mampumembeli Raskin Rp.1000,- perkilogramnya, maka haknya akan hilang. Akan tetapi di wilayah ini jatah masing-masing warga ditetapkan sama, yakni dengan system bagi rata. Rembug desa tersebut dikaukan karena adanya rasa iri/meri, dan adanya criteria miskin yang sangat tipis, belum ada criteria yang jelas.

G. Manipulasi Kemiskinan, sebagai salah satu praktek Korupsi

Adanya masyarakat desa yang menghendaki: Hasil rembug desa/musyawarah desa menetapkan siapa saja yang berhak menerima raskin, yang disebabkan adanya rasa meri/iri, batas miskin yang sangat tipis, dan konsep dibagi rata, tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Drs. Susanto, kabid Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB KabupatenM pada acara Dialog Publik, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005 yang lalu yang mengambil tema tentang Program Raskin (Beras Miskin)

Dengan demikian masyarakat tersebut telah melakukan suatu bentuk korupsi secara kolektif, yakni salahsatunya dengan melakukan manipulasi data. Dengan manipulasi data tersebut sebuah keluarga yang tidak termasuk KK miskin dalam proses pendataan dimasukkan dalam kategori KK miskin, sehingga KK tersebut bisa mendapatkan jatah Raskin.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dari data 2 table di bawah, dari table itu nampak adanya manipulasi data KK Miskin, yang banyak terjadi di daerah atau wilyah yang pemahaman keagamaannya cukup memperhatikan, yang secara kebetulan wilayah-wilyah tersebut sedikit bahkan tidak ada pusat-pusat

kegiatan keagamaan termasuk di dalamnya pesantren. Dengan demikian, cukup bias dimengerti bahwa lingkungan yang agamis sangat mempengaruhi pemahaman dan perilaku keagamaan masyarakatnya, yang pada akhirnya berdampak pada pemahaman mereka terhadap Syukur. Pemahaman terhadap Syukur ini, pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap Program Raskin, yaitu program pemerintah, yang berupa bantuan Beras yang diuperuntukkan untuk keluarga miskin. Tingkat pemahaman keagamaan, terutama konsep syukur dari keluarga miskin yang berbeda, akan melahirkan sikap yang berbeda pula.

Dari keseluruhan Keluarga miskin yang penulis teliti hanya ada 25 % yang dapat memahami dan mempraktikkan sikap syukur dalam kehidupannya. yang secara kebetulan kebanyakan mereka berada di wilayah pusat-pusat keagamaan, di wilayah tersebut ditemukan beberapa pesantren. Mereka bisa bersikap qonaah, nerimo ing pandum dan tidak tamak, justru mereka tetap senang tiasa bersyukur, walaupun kehidupan ekonominya pas-pasan. Sehingga keluarga ini dalam mensikapi pendataan kebanyakan bersikap pasif, yakni "dikasih mau tidak dikasih juga tidak apa-apa", bahkan banyak juga yang bersikap menolak, yang berarti Keluarga Miskin tersebut meskipun secara ekonomi pas-pasan, tetapi karena keluarga miskin yang lebih membutuhkan ada lebih banyak, maka mereka menolaknya. Hal ini tidak bias dilepaskan dari pemahaman keagamaan dari belajar dari guru ngaji mereka atau di pesantren di desanya.

Adapun dalam Pendataan keluarga, sensus dan sebagainya ini, untuk mendata di seluruh Indonesia, beayanya ratusan Milyar. Untuk pendataan di kab.M sudah menghabiskan beberapa milyar. Dan memang yang namanya pendataan sesuai dengan kepentingannya, Akan tetapi untuk pendataan Keluarga Miskin dari BKKBN sudah ada indicator/criteria yang sejenis dari seluruh Indonesia. Akan tetapi karena dengan criteria yang cukup banyak, pendataannya cuma dilaksanakan kurang dari satu bulan dengan satu petugas BPS di satu kecamatan untuk

sekian puluh ribu penduduk, sehingga tidak akan mungkin menghasilkan data yang valid. Hal ini kemudian dari petugas BPS ini diserahkan/merekrut tenaga pendata di desa-desa, mereka diikutkan kursus pendataan, tetapi karena SDM desa sangat terbatas dan masing-masing mempunyai daya tangkap berbeda, maka terjadilah berbagai macam penafsiran dari petugas pendataan tersebut, sehingga angka-angka dari setiap desa, ini menjadi tinggi dan lebih lebih, hal ini disebabkan Karena aparat desa tersebut mengetahui bahwa pendataan ini dalam rangka mendapatkan bantuan, maka pendataan ini sangat bersifat sobyektif dalam arti warganya dan keluarganya agar nanti mendapatkan bantuan yang sebanyak-banyaknya, maka pendapatan banyak terjadi penyimpangan dari materi/criteria yang ditetapkan. terjadilah praktek manipulasi data kemiskinan.

Di bawah ini ada dua tabel, yang menunjukkan adanya manipulasi data

**JUMLAH KEPALA KELUARGA
DAN RUMAH TANGGA MISKIN KAB.M
(Data sebelum ada Program Bantuan)**

DESA/KELURAHAN	JUMLAH SLS/RT	JUMLAH KELUARGA/RM TG	JUMLAH RMTG MISKIN
1. Salaman	642	18.466	7.317
2. Borobudur	473	15.012	7.587
3. Ngluwar	315	8.751	2.542
4. Salam	408	11.675	3.437
5. Srumbung	497	11.878	2.692
6. Dukun	458	11.905	4.647
7. Muntilan	493	19.762	5.533
8. Mungkid	572	17.327	6.676
9. Sawangan	607	14.562	5.370
10. Candi Mulyo	376	11.173	4.774
11. Mertoyudan	763	26.117	4.717
12. Tempuran	426	11.402	2.961
13. Kajoran	573	13.447	5.929
14. Kaliangkrik	564	13.159	6.365
15. Bandongan	404	13.486	5.629
16. Windusari	441	11.649	4.507
17. Secang	498	18.335	7.069
18. Tegalreja	444	12.182	4.663
19. Pakis	557	13.766	3.694
20. Grabag	842	20.403	8.415
21. Ngablak	377	10.331	3.922

Sumber : BPS KabupatenM

Data tersebut diambil ketika pemerintah kabupatenM akan membuka program transmigrasi. Pendataan telah dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, akan tetapi ketika masyarakat mengetahui bahwa pendataan tersebut dilakukan dalam rangka program transmigrasi, maka sebaliknya jumlah KK Miskin menjadi mengecil, karena banyak KK yang kemudian menarik datanya sebagai keluarga miskin.

**JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN M
HASIL PENDATAAN TAHAP I
(Data yang dilakukan untuk program Raskin)**

DESA/ KELURAHAN	JUMLAH SLS/RT	JUMLAH KELUARGA/ RMTG	JUMLAH RMTG MISKIN
1. Salaman	642	18.466	8.310
2. Borobudur	473	15.012	11.758
3. Ngluwar	315	8.751	3.342
4. Salam	408	11.675	5.430
5. Srumbung	497	11.878	3.592
6. Dukun	458	11.905	6.444
7. Muntilan	493	19.762	6.633
8. Mungkid	572	17.327	9.776
9. Sawangan	607	14.562	6.470
10. Candi Mulyo	376	11.173	5.607
11. Mertoyudan	763	26.117	5.171
12. Tempuran	426	11.402	3.161
13. Kajoran	573	13.447	7.992
14. Kaliangkrik	564	13.159	7.536
15. Bandongan	404	13.486	7.562
16. Windusari	441	11.649	6.761
17. Secang	498	18.335	7.069
18. Tegalrejo	444	12.182	5.404
19. Pakis	557	13.766	4.500
20. Grabag	842	20.403	10.141
21. Ngablak	377	10.331	4.722

Sumber : BPS Kabupaten M

Dengan membandingkan dari dua table data di atas, akan terlihat praktek penyimpangan yang dilakukan oleh Masyarakat bawah , Dimana jumlah KK Miskin mengalami kenaikan yang sangat dratis, ketika ada program subsidi dari Pemerintah, yaitu Program Raskin dan SLT. Dan begitu juga sebaliknya jumlah KK Miskin menjadi mengecil ketika di Kab.M ada pendataan KK Miskin untuk program transmigrasi.

H. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi data

Dengan munculnya fenomena yang sangat kuat masyarakat bawah di Kabupaten M, yang mayoritas muslim, bahkan sebagian besar ada di dekat kantung-kantung pesantren (Lihat data nama Kecamatan yang dicetak tebal), telah berani memanipulasi data kemiskinan demi untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan demikian masyarakat tersebut telah membudayakan *kufur* dan bukan *Sukr* atas nikmat yang telah diterimanya. Dan Fenomena tersebut terjadi tidak hanya ketika ada Program Raskin tetapi juga pada Bantuan Dana Kompensasi BBM.

Adapun secara garis besar, faktor-faktor penyebab terjadinya manipulasi data, dapat disimpulkan sbb. **Pemerintah:** Miskinnya contoh atau teladan non korup dari penyelenggara Negara, Tidak adanya sanksi yang menyakinkan sebagai orang yang telah mencuri uang negara. Jadwal waktu pelaksanaan sosialisasi dan pendataan yang sangat singkat (antara 3-4 minggu), Adanya sinyalemen beberapa petugas yang kurang memahami dalam mengaplikasikan criteria terhadap Rumah Tangga Miskin pada saat pendataan, Adanya sinyalemen Petugas Pendata (PCL) tidak fair dalam pendataan (unsur kekeluargaan dan senang/tidak senang), Tidak ditetapkannya prosedur pendataan melalui musyawarah antar warga untuk memperoleh input data Rumah Tangga Miskin yang valid. **Masyarakat:** Miskinnya contoh atau teladan non korup dari penyelenggara Negara, Tidak adanya sanksi yang menyakinkan sebagai orang yang telah mencuri uang negara, Hasil rembuk desa/ musyawarah desa menetapkan siapa saja yang berhak menerima raskin, Rembuk desa ini dihadiri tokoh agama setempat, tokoh masyarakat, PNS, guru yang pada akhirnya memutuskan bahwa program raskin harus dibagi rata, Terjadi kecemburuan social antara Rumah Tangga yang menerima Raskin dengan yang tidak menerima,

karena realita lapangan hanya berbeda tipis tingkat kesejahteraannya, kecemburuan ini juga mengarah ke terjadinya konflik social antar warga. Sebagai contoh di beberapa desa rumah kepala desa menjadi sasaran masyarakat yang tidak puas. (dipaparkan oleh Drs. Susanto, kabid Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB KabupatenM pada acara Dialog Publik, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2005), Terjadi upaya pemaksaan warga kepada petugas pendata/aparat/petugas BPS untuk mendapatkan juga Raskin walaupun secara teori rumah tangga tersebut tidak termasuk criteria Rumah Tangga Miskin, Terjadi pemerataan Raskin antara warga yang menerima dengan yang tidak menerima, dengan maksud tercipta kondisi yang kondusif.

I. Kesimpulan

Program Raskin sudah dimulai sejak 1998, sehingga telah berlangsung selama 8 tahun. Beras Miskin (Raskin) harus diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang sah dan sesuai dengan daftar penerima manfaat. Adapun keluarga penerima manfaat yang sah adalah keluarga miskin..Sedangkan jumlahnya Minimal 10 kg/KK/Bulan, Maxsimal 20 Kg/KK/Bulan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat melalui rembug desa memutuskan dibagi rata, sehingga Per KK mendapat rata-rata 4 kg/bulan .Adanya masyarakat desa yang menghendaki: Hasil rembug desa/musyawaharah desa menetapkan siapa saja yang berhak menerima raskin,yang disebabkan adanya rasa meri/iri,batas miskin yang sangat tipis,dan konsep dibagi rata tersebut,dengan demikian masyarakat tersebut telah melakukan suatu bentuk korupsi secara kolektif, yakni salahsatunya dengan melakukan manipulasi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Laode Ida, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta : P3M,2004
- Suharko, *korupsi Politik dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: P3M, 2004
- Masdar F. Mas'udi, *Problematika dan Kebutuhan Membangun Fiqh Anti Korupsi, dalam Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta: P3M, 2004
- Suharsipmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980.
- S.Nasution, *Metode research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Winarno Surrakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sirvai*, Jakarta:LP3ES, 1989.
- Sumardi Mulyanto, (ed), *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan,1992.

Indal Abror: Dosen Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta